

**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN
PENDUDUK, INFLASI, GDP, DAN UPAH
TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN
DI INDONESIA
PERIODE 1990-2010**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**REKHA RADITYA ARIEFTA
NIM. C2B008093**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2014**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Rekha Raditya Ariefta

Nomor Induk Mahasiswa : C2B008093

Fakultas/Jurusan : Ekonomi / IESP

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH
PERTUMBUHAN PENDUDUK,
INFLASI, GDP DAN UPAH
TERHADAP TINGKAT
PENGANGGURAN DI INDONESIA
PERIODE 1990-2010**

Dosen Pembimbing : Nenek Woyanti, SE., M.Si

Semarang, 17 Februari 2014

Dosen Pembimbing

(Nenek Woyanti, SE., MSi)

NIP. 19690512 199403 2003

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Rekha Raditya Ariefta

Nomor Induk Mahasiswa : C2B008093

Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / IESP (Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan)

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH
PERTUMBUHAN PENDUDUK, INFLASI,
GDP, DAN UPAH TERHADAP TINGKAT
PENGANGGURAN DI INDONESIA
PERIODE 1990-2010**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal : 26 Februari 2014

Tim Penguji :

1. Nenek Woyanti SE.,M.Si (.....)

2. Dra. Hj. Tri Wahyu Rejekiingsih M.Si (.....)

3. Achma Hendra SE.,M.Si (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Rekha Raditya Ariefta, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Inflasi, GDP, dan Upah Terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 17 Februari 2014

Yang membuat pernyataan,

(Rekha Raditya Ariefta)
NIM : C2B008093

**You may not always get what you *want*, but if you pray
and trust in *God*, you will always get what you *need***
Believe in Allah Plans

Percaya, bahwa di dunia ini gak ada satupun hal
baik yang sia-sia

Kita tidak akan pernah bebas dan sukses jika terus
mengekan diri dalam ketakutan akan kesalahan saat
mencoba. -Unknown-

FREE YOURSELF AND LIVE YOUR DREAMS, AND-JOYS!

***Jangan kehilangan keberanian mu apapun masalahnya, jika
menyerah berarti permainan selesai.***

Sompimpa Alaium Gambreng

Persembahan :

- Orang Tua
- Keluarga
- Para Sahabat
- Almamater

ABSTRACT

Economic growth can be used as a benchmark for the success of a region's economic development. Economic development of a region can be seen from several economic indicators. One of them is the level of unemployment. Indonesia country population that is increasing each year, as well as the highest GDP growth in Indonesia, but why the unemployment rate in Indonesia is also high.

The purpose of this study was to analyze how the variables influence the population growth, inflation rate, GDP rate, and wage rate of unemployment rate that occurred in Indonesia in 1990-2010. The Regression model used is the method of multiple linear regression analysis (Ordinary Least Squares) using time series data from the years 1990-2010.

Regression analysis showed that overall independent variables (population growth, inflation, GDP, wage) collectively have the same effect on the unemployment rate that occurred in Indonesia. The R^2 value of 0.736 which means that at 73.6 percent is the explanation of the dependent variable. While the remaining 26.4 percent is explained by the other variables outside the model used.

Keywords: Unemployment Rate, Population Growth, Inflation, GDP, Wage

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari beberapa indikator perekonomian. Salah satu diantaranya adalah tingkat pengangguran. Di Indonesia jumlah penduduk yang selalu meningkat tiap tahunnya, begitu pula dengan pertumbuhan GDP, tetapi mengapa angka pengangguran di Indonesia juga tinggi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh variabel pertumbuhan penduduk, inflasi, GDP, dan upah terhadap tingkat pengangguran yang terjadi Indonesia tahun 1990-2010. Metode regresi yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda (Ordinary Least Squares) dengan menggunakan data secara runtut waktu (time series) dari tahun 1990-2010.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel independen (pertumbuhan penduduk, inflasi, GDP, dan Upah) secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran yang terjadi di Indonesia. Nilai R² sebesar 0,736 yang berarti sebesar 73,6 persen variasi tingkat pengangguran dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, inflasi, GDP, dan upah. Sedangkan 26,4 persen sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang digunakan.

Kata Kunci: Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Penduduk, Inflasi, GDP, Upah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah- Nya. Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan syukur untuk segala anugerah yang tak terhingga yang telah diberikan kepada penulis selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan proses studi yang sangat tidak mudah ini dan menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Inflasi, GDP, dan Upah Terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, MSi., Akt., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Hadi Sasana S,E., MSi, selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis.

3. Ibu Nenek Woyanti S.E., MSi, selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan segala bimbingan serta arahnya selama penulisan skripsi ini.
4. Ibu Tri Wahyu Rejekiningsih S.E., MSi., selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis dari awal hingga akhir studi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
5. Kepada kedua Orang Tua tercinta, Ahmad Nasir dan Sri Utami, sumber dari segala kasih sayang dan cinta tulus yang telah menjadi pemberi semangat bagi penulis, atas doa, nasihat serta dukungan yang tak henti diberikan kepada penulis
6. Fakhri Alwan Dhiatama, adik yang penulis cintai dan banggakan. Terima kasih atas motivasi dan semangat yang diberikan kepada penulis.
7. Keluarga kecil bahagia Mia, Najmu dan Djunda, kakak yang penulis cinta dan banggakan. Terima kasih atas saran, kritik, dan motivasi yang telah diberikan.
8. Para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
9. Mas Riza dan Mas Andhika, sebagai mentor selama pengerjaan skripsi ini, terima kasih atas saran dan kritik nya.
10. Superdamn Squad. Terima kasih pada keluarga besar dan bahagia penulis atas segala pengalaman dan cerita selama di Semarang.
11. Doping Chanel, terima kasih atas pengalaman, waktu dan tempat yang diberikan untuk penulis.

12. Terima kasih kepada teman dan keluarga DISCO (Diponegoro Scooter) atas pengalaman berorganisasi dan berkendara vespa.
13. Tarno Squad. Terima kasih atas motivasi dan waktu singkat yang berarti bagi penulis.
14. Terima kasih untuk teman, sahabat, saudara Parsaoran A.P Simarmata, meskipun singkat, banyak hal yang ditinggalkan dan tertanam dalam diri penulis. Selamat jalan kawan, Senyum dan Tularkan.
15. Terima kasih untuk teman angkatan IESP 08 atas kerja sama dan pengalaman yang diberikan untuk penulis selama kuliah.
16. Teman-teman KKN Desa Jambu, Kec. Mlongo. Terima kasih atas cerita singkatnya.
17. Terima kasih kepada warga kosan wonodri, kontrakan singosari 6, rotterdam, kontrakan doping, kosan pak Tarno.
18. Terima kasih kepada teman-teman di kosan pak Leman, kosan wisma merdeka, kosan laras, burjo, kosan wisma sarjana, warteg citra tegal
19. Terima kasih kepada segenap karyawan dan petugas di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
20. Serta kepada semua teman dan segenap pihak yang tidak disebutkan satu persatu. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan pengetahuan yang penulis peroleh hingga saat ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna terciptanya kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak – pihak yang membacanya.

Semarang, 17 Februari 2014

Rekha Raditya Ariefta
C2B008093

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
BAB II TELAAH PUSTAKA	16
2.1 Landasan Teori	16
2.1.1 Teori Ketenagakerjaan	16
2.1.2 Teori Pertumbuhan Klasik	23
2.1.3 Teori Pertumbuhan David Ricardo	24
2.1.4 Model Pertumbuhan Solow.....	25
2.1.5 Teori A.W Philips	26
2.1.6 Pengangguran.....	28
2.1.7 Teori Pertumbuhan Penduduk.....	35
2.1.8 Teori Inflasi.....	36
2.1.9 Pendapatan Nasional.....	38
2.1.10 Teori Upah.....	40
2.1.11 Hubungan Antara Variabel Dependen dan Variabel Independen.....	44
2.2 Penelitian Terdahulu	47
2.3 Kerangka Pemikiran	56
2.4 Hipotesis	58
BAB III METODE PENELITIAN	59
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	59
3.2 Jenis Data dan Sumber Data	61
3.3 Metode Pengumpulan Data	62
3.4 Metode Analisis	63
3.4.1 Analisis Regresi Berganda	63
3.4.2 Pendeteksian Penyimpangan Asumsi Klasik...	64
3.4.3 Deteksi Statistik	67

BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	71
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	71
4.1.1	Keadaan Penduduk Indonesia	71
4.1.2	Jumlah dan Pertambahan Penduduk	71
4.1.3	Inflasi	74
4.1.4	GDP.....	76
4.1.5	Upah	78
4.2	Analisis Data	81
4.2.1	Hasil Deteksi Asumsi Klasik	82
4.2.2	Pendeteksian Statistik Analisis Regresi	85
4.3	Interpretasi Hasil.....	90
BAB V	PENUTUP	94
5.1	Simpulan	94
5.2	Keterbatasan	95
5.3	Saran	96
	DAFTAR PUSTAKA	98
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	101

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Tingkat Pertumbuhan Penduduk, Tingkat Pertumbuhan Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran, dan Persentase Penduduk yang Bekerja Terhadap Angkatan kerja.....	2
Tabel 1.2 Tingkat Inflasi dan Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 2001-2010	8
Tabel 1.3 Pertumbuhan Upah dan Pertumbuhan GDP di Indonesia Tahun 2001-2010.....	12
Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu	54
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Indonesia Tahun 1990-2010.....	72
Tabel 4.2 Tingkat Inflasi di Indonesia Tahun 1990-2010.....	74
Tabel 4.3 Besaran dan Pertumbuhan GDP di Indonesia Tahun 1990-2010.....	76
Tabel 4.4 Upah dan Pertumbuhan Upah di Indonesia Tahun 1990-2010.....	79
Tabel 4.5 Hasil Uji <i>Breusch-Godfrey</i>	83
Tabel 4.6 R^2 <i>Auxiliary Regression</i>	84
Tabel 4.7 Hasil Deteksi Glejser	85
Tabel 4.8 Hasil Deteksi Regresi.....	85
Tabel 4.9 Hasil Regresi.....	86
Tabel 4.10 Hasil Deteksi t.....	87
Tabel 4.11 Hasil Deteksi F.....	89

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kurva Permintaan Tenaga Kerja.....	18
Gambar 2.2 Kurva Penawaran Tenaga Kerja	21
Gambar 2.3 Kurva Keseimbangan Tenaga Kerja	22
Gambar 2.4 Kurva Philips.....	27
Gambar 2.5 Kurva Penetapan Upah di Pasar Tenaga Kerja.....	41
Gambar 4.1 Perubahan Jumlah Penduduk.....	73
Gambar 4.2 Perubahan Inflasi.....	75
Gambar 4.3 Perubahan GDP.....	78
Gambar 4.4 Perubahan Upah.....	81
Gambar 4.5 Uji Normalitas.....	82

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Data Mentah	101
Lampiran B Hasil Olahan dengan Eviews	103

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara di Asia bahkan dunia yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, terbesar keempat setelah China, India, Amerika Serikat, Indonesia sendiri memiliki penduduk 242.325.638 jiwa pada tahun 2012 (www.google.com, 2012). Pertumbuhan penduduk dapat dipandang sebagai faktor pendukung pembangunan sebab dengan penambahan penduduk berarti juga penambahan tenaga kerja yang dapat meningkatkan produksi dan memperluas pasar. Sedangkan disatu pihak pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor penghambat (Sukirno, 2001).

Permasalahan dalam bidang kependudukan berimplikasi pada masalah ketenagakerjaan. Dari tahun 2001-2010, Indonesia mengalami masalah pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan, yakni rata-rata sebesar 1,4 persen tiap tahun. Pertumbuhan penduduk terbesar terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 2.71 persen. Angkatan kerja di Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2003 yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu sebesar -0,45 persen. Rata-rata peningkatan angkatan kerja yang terjadi di Indonesia adalah sebesar 1,9 persen per tahun.

Pertumbuhan yang terjadi pada jumlah penduduk dan jumlah angkatan kerja ternyata tidak diimbangi oleh tingginya penyerapan tenaga kerja yang

ada. Akibat dari kurangnya penyerapan tenaga kerja akan menimbulkan pengangguran. Dari tahun 2001-2010, Indonesia mengalami masalah pengangguran yang tidak ringan. Pengangguran pada tahun 2001-2006 mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu melebihi 8 persen per tahun. Bahkan pada tahun 2006, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 10,27 persen. Rata – rata tingkat pertumbuhan penduduk dari tahun 2001 – 2010 adalah sebesar 1.4 persen, sedangkan rata – rata tingkat pengangguran sebesar 9 persen. Berikut data tentang tingkat pertumbuhan penduduk, angkatan kerja, pengangguran, dan persentase bekerja terhadap angkatan kerja dari tahun 2001 -2010 tersaji pada Tabel 1.1.

TABEL 1.1
TINGKAT PERTUMBUHAN PENDUDUK, ANGKATAN KERJA,
PENGANGGURAN DAN PERSENTASE PENDUDUK YANG
BEKERJA TERHADAP ANGKATAN KERJA DI INDONESIA
TAHUN 2001 – 2010

Tahun	Tingkat Pertumbuhan Penduduk (persen)	Tingkat Pertumbuhan Angkatan Kerja (persen)	Tingkat Pengangguran (persen)	Persentase bekerja thd AK (%)
2001	1.36	3.3	8.1	91.9
2002	1.34	1.99	9.06	90.94
2003	1.33	-0.45	9.9	90.5
2004	1.32	3.64	9.85	90.14
2005	1.3	1.75	10.25	89.74
2006	0.97	0.55	10.27	89.72
2007	1.28	3.33	9.1	90.89
2008	1.61	1.82	8.39	91.61
2009	1.24	1.68	7.87	92.13
2010	2.71	2.36	7.13	92.86
Rata-rata	1.44	1.99	8.9	91.04

Sumber: Statistik Tahunan Indonesia, BPS, 2001—2010

Dengan terus bertambahnya jumlah populasi penduduk Indonesia dari tahun ke tahun disatu sisi memang memberikan dampak positif yaitu tersedianya banyak tenaga kerja yang tersedia. Namun disisi lain karena banyaknya jumlah tenaga kerja tidak sebesar jumlah kesempatan kerja yang tersedia maka banyak penduduk Indonesia yang menjadi pengangguran. Laju pertumbuhan penduduk yang sangat cepat akan menyebabkan terjadinya kelebihan tenaga kerja dan apabila tanpa diikuti dengan perluasan kesempatan kerja dapat menimbulkan masalah pengangguran

Selain pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Perekonomian di suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik (Amir, 2007).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap

tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun (Tambunan, 2009). Selain dari sisi permintaan (konsumsi), dari sisi penawaran, pertumbuhan penduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja (sumber pendapatan). Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut (*ceteris paribus*), yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan. Pemenuhan kebutuhan konsumsi dan kesempatan kerja itu sendiri hanya bisa dicapai dengan peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau PDB yang terus-menerus. Dalam pemahaman ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan PDB, yang berarti peningkatan Pendapatan Nasional.

Pembangunan ekonomi adalah sebuah usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang diukur melalui tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita (Suparmoko, 1999). Sedangkan menurut Todaro (2003), pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses multidimensi yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional, seperti halnya percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan pemberantasan kemiskinan absolut. Oleh karenanya, pembangunan ekonomi tidak dapat diukur semata-mata dari tingkat pertumbuhan pendapatan atau pendapatan per-kapita, namun harus pula melihat bagaimana pendapatan tersebut didistribusikan kepada penduduk dan mengetahui siapa yang mendapat manfaat dari pembangunan tersebut.

Pembangunan ekonomi sebuah negara dapat dilihat dari beberapa indikator perekonomian. Salah satu diantaranya adalah tingkat pengangguran. Melalui tingkat pengangguran kita dapat melihat tingkat kesejahteraan masyarakat serta tingkat distribusi pendapatan. Pengangguran terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja yang disebabkan karena rendahnya pertumbuhan penciptaan lapangan kerja.

Berdasarkan UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional). Dalam pelaksanaan RPJM Nasional, dikenal adanya strategi pokok pembangunan yang salah satunya memuat mengenai strategi pembangunan Indonesia. Sasaran pokok dari strategi pembangunan Indonesia adalah untuk pemenuhan hak dasar rakyat serta penciptaan landasan pembangunan yang kokoh. Hak-hak dasar rakyat yang dimaksudkan adalah dalam bentuk bebas dari kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, ketidakadilan, penindasan, rasa takut, dan kebebasan mengemukakan pikiran dan pendapatnya memperoleh prioritas untuk diwujudkan. Hak-hak dasar tersebut selama ini telah terabaikan dan hanya menjadi tujuan sampingan dalam proses pembangunan yang berjalan padahal hak-hak dasar tersebut secara jelas diamanatkan oleh konstitusi. Tanpa pemenuhan hak dasar akan sulit diharapkan partisipasi pada kebebasan dan persamaan. Untuk itu diperlukan adanya agenda dalam melaksanakan rencana program pembangunan tersebut yang ditujukan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai dari adanya program ini antara lain; penciptaan lapangan kerja yang memadai untuk mengurangi pengangguran, mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesenjangan pembangunan antar wilayah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perbaikan mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam, serta perbaikan infrastruktur penunjang.

Pengangguran di Indonesia menjadi masalah yang terus menerus bertambah. Sebelum krisis ekonomi tahun 1997, tingkat pengangguran di Indonesia pada umumnya di bawah 5 persen dan pada tahun 1997 sebesar 4,68 persen. Tingkat pengangguran sebesar 4,68 persen masih merupakan pengangguran alamiah. Tingkat pengangguran alamiah adalah suatu tingkat pengangguran yang alamiah dan tak mungkin dihilangkan. Tingkat pengangguran alamiah ini sekitar 5 - 6 persen. Artinya jika tingkat pengangguran paling tinggi 5 - 6 persen itu berarti bahwa perekonomian dalam kondisi penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*).

Peningkatan angkatan kerja baru yang lebih besar dibandingkan dengan lapangan kerja yang tersedia terus menunjukkan jurang (*gap*) yang terus membesar. Kondisi tersebut semakin membesar setelah krisis ekonomi. Dengan adanya krisis ekonomi tidak saja jurang antara peningkatan angkatan kerja baru dengan penyediaan lapangan kerja yang rendah terus makin dalam, tetapi juga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini menyebabkan tingkat pengangguran di Indonesia dari tahun ke tahun terus semakin tinggi. Tingkat pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan potensi nasional

dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Para penganggur tidak mempunyai sumber penghasilan untuk memenuhi baik kebutuhan hidupnya maupun kebutuhan hidup keluarganya.

Pengangguran merupakan isu penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, dan beberapa indikator ekonomi yang dapat mempengaruhi besarnya tingkat pengangguran diantaranya adalah tingkat inflasi yang terjadi, besaran tingkat upah yang berlaku, tingkat pertumbuhan penduduk dan tingkat pendidikan sumber daya manusia. Dengan semakin tinggi tingkat inflasi dan tingkat pertumbuhan penduduk akan berpengaruh pada tingkat pengangguran yang tinggi. Sedangkan semakin tinggi tingkat upah dan tingkat pendidikan akan berpengaruh pada tingkat pengangguran yang rendah.

Kenyataan menunjukkan bahwa tingkat pengangguran dan laju inflasi saling mempengaruhi dan keduanya membawa dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Laju inflasi yang tinggi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap jasa bank dan mendorong masyarakat untuk menyimpan uangnya dalam bentuk barang-barang nonproduktif, seperti emas dan tanah. Laju inflasi yang tinggi mengakibatkan nilai riil upah merosot sehingga sangat merugikan masyarakat penerima upah atau gaji.

Inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Sedangkan tingkat inflasi adalah presentasi kenaikan harga-harga barang dalam periode waktu tertentu (Sukirno, 2006). Dengan semakin tingginya tingkat inflasi yang terjadi maka akan berakibat pada

tingkat pertumbuhan ekonomi yang menurun sehingga akan terjadi peningkatan terhadap angka pengangguran.

TABEL 1.2
TINGKAT INFLASI DAN TINGKAT PENGANGGURAN DI
INDONESIA
TAHUN 2001-2010

Tahun	Tingkat inflasi (persen)	Tingkat pengangguran (persen)
2001	12.6	8.01
2002	10.03	9.06
2003	5.06	9.9
2004	6.4	9.85
2005	17.11	10.25
2006	6.6	10.27
2007	6.59	9.1
2008	11.06	8.39
2009	2.78	7.87
2010	6.96	7.13
Rata-rata	8.5	9

Sumber: Statistik Tahunan Indonesia, BPS, 2001—2010

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat perbandingan antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran yang ada di Indonesia pada periode waktu tahun 2001-2010. Tingkat inflasi yang ada di Indonesia pada kurun waktu tersebut mengalami perubahan. Pada tahun 2005 tingkat inflasi di Indonesia mencapai 17,11 persen, merupakan angka tertinggi dalam kurun waktu sepuluh tahun tersebut. Sedangkan angka terendah pada tingkat inflasi pada periode waktu tersebut adalah pada tahun 2009 sebesar 2,78 persen, dan rata – rata pertumbuhan tingkat inflasi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir adalah sebesar 8,5 persen. Sama dengan besaran tingkat inflasi yang cenderung mengalami fluktuasi, tingkat pengangguran di Indonesia juga mengalami

fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada periode tahun 2001-2010, pertumbuhan tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 9 persen.

Negara - negara di dunia selalu menghadapi permasalahan inflasi ini, tanpa terkecuali. Oleh karena itu, tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu negara merupakan salah satu ukuran untuk mendeteksi baik buruknya masalah ekonomi yang dihadapi suatu negara. Bagi negara yang perekonomiannya baik, tingkat inflasi yang terjadi berkisar antara 2 - 4 persen per tahun, dengan persentase sebesar itu, dapat dikatakan inflasi yang rendah. Sedangkan tingkat inflasi yang tinggi yaitu berkisar >10 persen (Sukirno, 2006). Namun demikian ada negara yang menghadapi tingkat inflasi yang lebih serius atau sangat tinggi, misalnya Indonesia pada tahun 1966 dengan tingkat inflasi 650 persen dan pada tahun 1998 mencapai 77,63 persen. Inflasi yang sangat tinggi tersebut disebut hiper inflasi (*hyper inflation*). Jika suatu negara mengalami hiper inflasi bisa dipastikan jumlah pengangguran di negara tersebut akan bertambah secara drastis. Karena dengan kenaikan harga-harga di semua sektor, maka perusahaan-perusahaan akan mengambil kebijakan mengurangi biaya untuk memproduksi barang atau jasa dengan cara mengurangi pegawainya atau tenaga kerja. Akibatnya, angka pengangguran yang tinggi tidak dapat dihindari dan dapat membuat perekonomian negara tersebut mengalami kemunduran. Oleh karena itu, inflasi sangat berkaitan erat dengan tingkat pengangguran.

Indikator ekonomi selanjutnya yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran adalah GDP (*Gross Domestic Product*) (Sukirno, 2006). GDP

adalah produk nasional yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi di dalam negeri (milik warga negara dan orang asing) dalam sesuatu negara (Sukirno, 2006).

Menurut hasil penelitian Dinarno dan Moore (1999) hubungan positif antara tingkat inflasi melalui GDP deflator dengan tingkat pengangguran yang terjadi di Belgia, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Belanda, Inggris dan Amerika Serikat. Ini artinya, semakin tinggi tingkat inflasi yang terjadi di negara-negara tersebut, akan mengakibatkan pengangguran yang tinggi pula. Sedangkan Amir (2007) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang nyata antara inflasi dan tingkat pengangguran di Indonesia periode 1980-2005.

Penelitian yang dilakukan oleh Dumairy (1996), menyebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang masih tergolong kepada negara berkembang memiliki tingkat upah yang cukup rendah. Sedangkan menurut hukum Okun, yang melihat hubungan antara tingkat pengangguran dengan GDP, menyatakan bahwa setiap terjadi peningkatan pada persentase tingkat pengangguran di suatu negara maka hal tersebut setara dengan terjadinya penurunan terhadap GDP sebesar 2 persen (Kaufman dan Hotchkiss, 1999). Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan terhadap tingkat pengangguran suatu Negara dapat dikaitkan dengan rendahnya pertumbuhan dalam GDP Negara tersebut (Mankiw, 2000).

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat hubungan tingkat pertumbuhan GDP dan tingkat pengangguran di Indonesia dalam periode 2001-2010. Tingkat

pengangguran di Indonesia cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2001 sampai tahun 2006, tetapi pada tahun 2007 mengalami penurunan sampai tahun 2010 (Tabel 1.3). Hal ini tidak sejalan dengan tingkat pertumbuhan GDP di Indonesia yang cenderung mengalami pertumbuhan disamping besaran GDP yang terus naik dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2009. Pada tahun 2007 pertumbuhan GDP di Indonesia mencapai 6,35 persen sedangkan di tahun 2009 menurun yakni menjadi 4,57 persen. Rata – rata tingkat pertumbuhan GDP dari tahun 2001 -2010 adalah 5,2 persen. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa besarnya tingkat pengangguran dan jumlah pengangguran yang terjadi di Indonesia mengalami peningkatan sejalan dengan adanya kenaikan besaran GDP walaupun tingkat pertumbuhan cenderung lambat. Ekonom Dorodjatun Kuntjoro-Jakti (2003) memperkirakan bahwa, jumlah angkatan kerja sebanyak 2.5 juta jiwa yang muncul setiap tahun tidak akan terserap bahkan dalam jumlah separuhnya dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 3 persen. Minimal pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen untuk menyerap angkatan kerja baru tersebut. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Choiril Maksud memperkirakan, setiap pertumbuhan PDB sebesar 1 persen dapat menambah jumlah pekerja sekitar 400.000 orang (Suara Karya, 2006).

TABEL 1.3
PERTUMBUHAN UPAH DAN PERTUMBUHAN GDP DI
INDONESIA PADA TAHUN 2001-2010

Tahun	Upah	Tingkat Pertumbuhan Upah	GDP (miliar rupiah)	Tingkat Pertumbuhan GDP	Tingkat Pengangguran
2001	307173	35.31	1440405.7	3.64	8.1
2002	362743	18.09	1505216.4	4.51	9.06
2003	414715	14.33	1577171.3	4.78	9.9
2004	476932	15	1656516.8	5.03	9.85
2005	530325	11.2	1750815.2	5.69	10.25
2006	602150	13.54	1847126.7	5.51	10.27
2007	672792	11.73	1964327.3	6.35	9.1
2008	743174	10.46	2082456.1	6.01	8.39
2009	841529	13.23	2177741.7	4.57	7.87
2010	908824	8	2310689.8	6.11	7.13
rata-rata		15.08		5.22	9

Sumber : Statistik Tahunan Indonesia, BPS, 2001-2010

Permasalahan utama selanjutnya dan mendasar dalam ketenagakerjaan di Indonesia adalah masalah upah yang rendah dan secara langsung dan tidak langsung berpengaruh pada tingkat pengangguran yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena penambahan tenaga kerja baru jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang dapat disediakan setiap tahunnya. .

Upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Upah merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit tenaga kerja yang berupa jumlah uang yang dibayarkan kepadanya (Mankiw, 2000). Penetapan tingkat upah yang dilakukan pemerintah pada suatu negara akan memberikan pengaruh terhadap besarnya tingkat pengangguran yang ada, semakin tinggi besaran upah yang ditetapkan oleh pemerintah maka hal

tersebut akan berakibat pada penurunan jumlah orang yang bekerja pada negara tersebut. Sehingga semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan akan membawa pengaruh pada tingginya tingkat pengangguran yang akan terjadi (Kaufman dan Hotchkiss, 1999). Hal ini bisa terjadi karena dengan semakin tinggi upah yang ditetapkan maka akan berpengaruh pada peningkatan biaya output yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Akibatnya suatu perusahaan akan melakukan efisiensi terhadap produksinya dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerjanya.

Upah minimum regional merupakan upah minimal yang diterima pekerja dan harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja yang ditetapkan oleh pemerintah di suatu daerah. (Boediono, 2004) Sedangkan upah rata-rata provinsi adalah jumlah rata-rata upah minimum di seluruh provinsi (Statistik Indonesia, 2007). Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat hubungan antara tingkat pertumbuhan upah dan tingkat pengangguran di Indonesia. Hubungan tersebut berjalan searah. Walaupun tingkat upah cenderung fluktuatif tetapi besaran tingkat upah yang ditetapkan pemerintah Indonesia terus meningkat besarnya tiap tahun. Besaran upah yang ditetapkan pemerintah pada periode 2001-2010 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2001, tingkat upah yang diterima oleh pekerja sebesar Rp.307.173,00. sampai tahun 2010 besarnya tingkat upah yang diterima oleh pekerja adalah sebesar Rp.908.824,00. Rata – rata pertumbuhan tingkat upah sebesar 13.7 persen.

1.2 Rumusan Masalah

Di Indonesia, pengangguran merupakan salah satu masalah yang sangat penting untuk diperhatikan mengingat rata-rata tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun 2001-2010 yang mencapai 9 persen dibandingkan dengan tingkat pengangguran alamiah yang hanya 5-6 persen. Angka pengangguran yang rendah dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang baik, serta dapat mencerminkan adanya peningkatan kualitas taraf hidup penduduk dan peningkatan pemerataan pendapatan, oleh karena itu kesejahteraan penduduk meningkat.

Pertumbuhan penduduk akan menambah jumlah angkatan kerja. Peningkatan angkatan kerja baru yang lebih besar dibandingkan dengan lapangan kerja yang tersedia terus menunjukkan jurang (*gap*) yang terus membesar. Kondisi tersebut semakin membesar setelah krisis ekonomi. Dengan adanya krisis ekonomi tidak saja jurang antara peningkatan angkatan kerja baru dengan penyediaan lapangan kerja yang rendah terus makin dalam, tetapi juga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini menyebabkan jumlah pengangguran di Indonesia dari tahun ke tahun semakin tinggi.

Inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Laju inflasi yang tinggi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap jasa bank dan mendorong masyarakat untuk menyimpan uangnya dalam bentuk barang-barang nonproduktif, seperti emas dan tanah. Laju inflasi yang tinggi mengakibatkan nilai riil upah merosot sehingga sangat merugikan masyarakat penerima upah atau gaji. Dengan semakin tingginya tingkat inflasi

yang terjadi maka akan berakibat pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang menurun sehingga akan terjadi peningkatan terhadap angka pengangguran.

Kenaikan gdp akan mengurangi jumlah pengangguran, hal ini sesuai dengan hukum okun yaitu bahwa setiap terjadi peningkatan pada persentase tingkat pengangguran di suatu negara maka hal tersebut setara dengan terjadinya penurunan terhadap GDP sebesar 2 persen. Penetapan tingkat upah yang dilakukan pemerintah pada suatu negara akan memberikan pengaruh terhadap besarnya tingkat pengangguran yang ada. Semakin tinggi besaran upah yang ditetapkan oleh pemerintah maka hal tersebut akan berakibat pada penurunan jumlah orang yang bekerja pada negara tersebut, hal ini bisa terjadi karena dengan semakin tinggi upah yang ditetapkan maka akan berpengaruh pada peningkatan biaya output yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Akibatnya suatu perusahaan akan melakukan efisiensi terhadap produksinya dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dibuat beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertumbuhan penduduk mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia?
2. Bagaimana inflasi mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia?
3. Bagaimana GDP mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia?
4. Bagaimana upah mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan dan kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh tingkat pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pengangguran yang terjadi di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh tingkat inflasi terhadap tingkat pengangguran yang terjadi di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh perubahan tingkat *Gross Domestic Product* (GDP) terhadap tingkat pengangguran yang terjadi di Indonesia.
4. Menganalisis pengaruh tingkat upah terhadap tingkat pengangguran yang terjadi di Indonesia.

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak – pihak yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu ekonomi.
3. Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dengan memberikan gambaran atau keadaan pengangguran di Indonesia. dan Dapat memberikan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk mengatasi masalah pengangguran yang terjadi di Indonesia.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Berbagai teori yang dikemukakan di bawah adalah merupakan dasar dalam perumusan hipotesis dan landasan dalam melakukan analisis penelitian ini. Dalam landasan ini akan dibahas mengenai tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat inflasi, tingkat pertumbuhan GDP, dan besaran tingkat upah.

2.1.1 Teori Ketenagakerjaan

Sumber daya manusia atau sering disebut dengan *human resources* merupakan penduduk secara keseluruhan. Dari segi penduduk sebagai faktor produksi, maka tidak semua penduduk dapat bertindak sebagai faktor produksi, hanya penduduk yang berupa tenaga kerja (*man power*) yang dapat dianggap sebagai faktor produksi (Suparmoko,1999).

Sumber Daya Manusia menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara fisik, kemampuan kerja diukur dengan usia. Dengan kata lain orang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja. Kelompok dalam usia tersebut dinamakan tenaga kerja atau *man power*. Secara singkat, tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja (Simanjuntak, 2005).

Tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah bekerja atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang sedang melakukan kegiatan lain, seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga (Simanjuntak, 2005). Sedangkan menurut Secha Alatas (dikutip dari Ananta, 2000), tenaga kerja merupakan bagian dari penduduk yang mampu bekerja untuk memproduksi barang dan jasa. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggolongkan penduduk usia 15-64 tahun sebagai tenaga kerja.

Menurut Payaman simanjuntak (2005) konsep dari tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja (*labour force*) merupakan bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlihat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu menghasilkan barang dan jasa. Angkatan kerja ini terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur. Golongan yang bekerja (*employed persons*) merupakan sebagian masyarakat yang sudah aktif dalam kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan sebagian masyarakat lainnya yang tergolong siap bekerja dan mencari pekerjaan termasuk dalam golongan menganggur.

Bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja maupun mencari pekerjaan, atau bisa dikatakan sebagai bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya tidak terlibat atau tidak berusaha terlibat dalam kegiatan produksi. Kelompok bukan angkatan kerja ini terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain yang menerima pendapatan. Pekerja tidak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu usaha untuk memperoleh

penghasilan/keuntungan yang dilakukan oleh salah seorang rumah tangga atau bukan anggota rumah tangga tanpa mendapat upah/gaji.

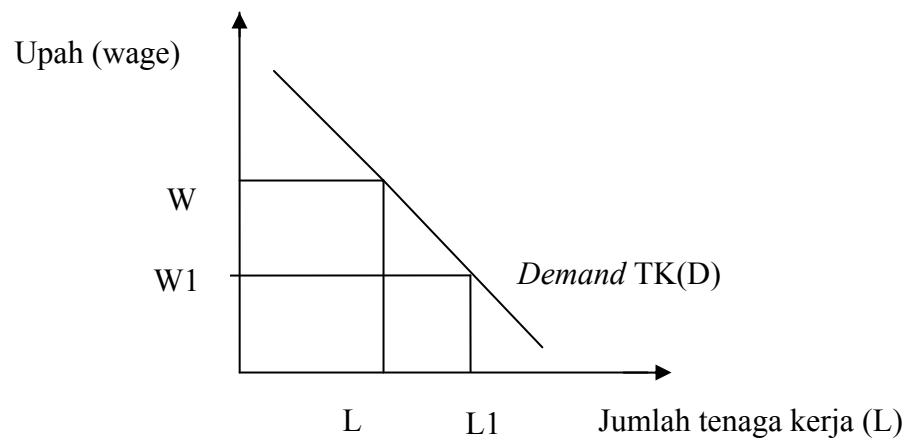
2.1.1.1 Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan adalah jumlah suatu komoditi yang bersedia dibeli individu selama periode waktu tertentu yang besarnya dipengaruhi oleh harga komoditi itu, pendapatan nominal, harga komoditi lain, dan cita rasa (Salvatore, 1997). Permintaan terhadap tenaga kerja merupakan sebuah daftar berbagai alternatif kombinasi tenaga kerja dengan input lainnya yang tersedia yang berhubungan dengan tingkat upah (Ananta, 2000). Permintaan tenaga kerja berasal dari pihak dunia usaha. Orang berusaha sendiri atau ada orang lain yang membutuhkan dan mempekerjakan. Misalnya, perusahaan tekstil memerlukan tenaga kerja untuk mengawasi mesin-mesin tenun, pengusaha toko memerlukan pramuniaga, dan sebagainya. Faktor-faktor produksi "diminta" karena diperlukan dalam proses produksi, sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai, yang dapat dipakai atau dijual (Gilarso, 2003).

Gambar 2.1 menunjukkan kurva permintaan tenaga kerja, di mana permintaan tenaga kerja ditentukan oleh produktivitas marginalnya dalam memproduksi output nasional. Gambar 2.1 memiliki kemiringan (*slope*) yang negatif. Kurva permintaan tenaga kerja tersebut menjelaskan mengenai besarnya tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja. Kurva tersebut memiliki hubungan yang negatif, hal ini ditunjukkan dengan upah mula-mula sebesar W dan tenaga kerja sebesar L . Saat upah turun sebesar W_1 maka permintaan tenaga kerja akan naik sebesar L_1 . Artinya semakin

tinggi tingkat upah yang diminta, maka akan berpengaruh pada penurunan jumlah tenaga kerja yang diminta. Sebaliknya jika tingkat upah yang diminta semakin rendah, maka jumlah permintaan akan tenaga kerja juga meningkat.

Gambar 2.1
Kurva Permintaan Tenaga Kerja



Sumber : Sadono Sukirno, 2006

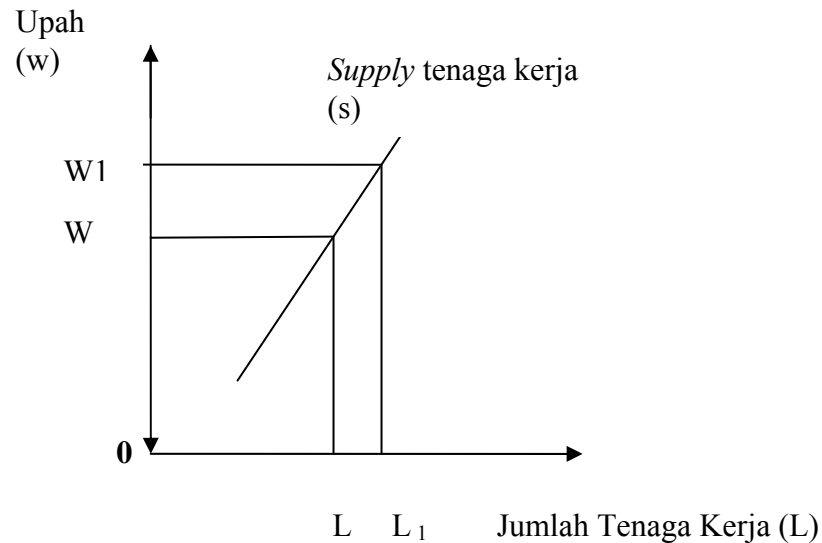
2.1.1.2 Penawaran Tenaga Kerja

Penawaran adalah jumlah komoditi yang bersedia ditawarkan oleh produsen selama periode waktu tertentu dan dipengaruhi oleh harga komoditi itu dan biaya produksi yang dikeluarkan (Salvatore, 1997). Penawaran tenaga kerja merupakan hubungan antara tingkat upah dan jumlah satuan tenaga kerja yang bersedia ditawarkan oleh *supplier* (Ananta, 2000). Penawaran tenaga kerja menunjukkan jumlah jam yang digunakan pada kegiatan untuk menghasilkan sesuatu di pabrik-pabrik, pertanian, bisnis lain, pemerintah, atau usaha nirlaba. Determinan utama

penawaran tenaga kerja adalah jumlah penduduk dan cara penduduk menggunakan waktunya (Samuelson, 1997). *Supply* tenaga kerja disebut juga jumlah tenaga kerja yang mau dan mampu melaksanakan pekerjaan tertentu dengan mendapat suatu balas karya (upah/gaji) berupa uang atau berupa barang. Ternyata ada hubungan tertentu antara tinggi rendahnya balas karya dan banyak sedikitnya orang yang mau melaksanakan pekerjaan tertentu (Gilarso, 2003).

Gambar 2.2 mengilustrasikan mengenai kurva penawaran tenaga kerja. Kurva tersebut menggambarkan mengenai hubungan antara besarnya tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja. Kurva penawaran kerja memiliki kemiringan (*slope*) yang positif, hal ini ditunjukkan dengan upah mula-mula yang ditetapkan sebesar W dan tenaga kerja yang ditawarkan sebesar L . Kemudian ada kenaikan upah sebesar W_1 , sehingga terjadi kenaikan penawaran tenaga kerja sebesar L_1 . Artinya semakin tinggi tingkat upah yang ditawarkan maka akan terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Sebaliknya, jika tingkat upah turun maka penurunan pada jumlah tenaga kerja yang ditawarkan pun akan terjadi.

Gambar 2.2
Kurva Penawaran Tenaga Kerja



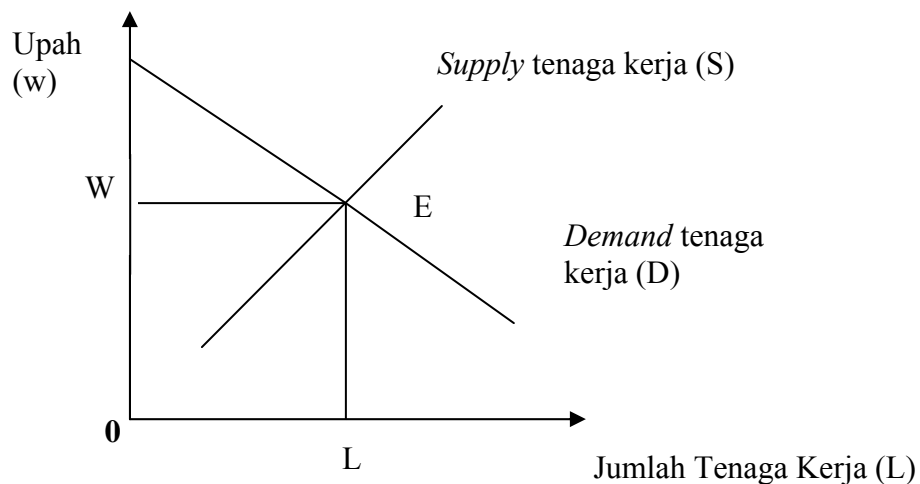
Sumber : Sadono Sukirno, 2006

2.1.1.3 Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja

Para produsen untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, memerlukan sumber-sumber daya atau faktor-faktor produksi: bahan, tanah, bangunan, modal dan tenaga kerja. Faktor-faktor produksi tersebut diperlukan dan diminta (segi permintaan) oleh para produsen. Selain itu yang menawarkan (segi penawaran) adalah para pemiliknya, yang mengharapkan suatu balas jasa tertentu untuk pemakaian faktor produksi yang dimiliki dan disediakannya. Pertemuan antara permintaan dan penawaran terjadi di pasar faktor produksi, dimana *demand* dan *supply* bersama-sama akan menentukan harga (Gilarso, 2003). Keseimbangan (*equilibrium*) adalah kondisi pasar yang sekali dicapai, cenderung untuk bertahan (Salvatore, 1997). Hal ini berarti keseimbangan terjadi apabila penawaran dan

permintaan akan barang seimbang. Begitu juga dengan penawaran tenaga kerja, keseimbangan tenaga kerja akan tercapai apabila permintaan akan tenaga kerja, sama atau seimbang dengan tenaga kerja yang ditawarkan.

Gambar 2.3
Kurva Keseimbangan Tenaga Kerja



Sumber : Sadono Sukirno, 2006

Berdasarkan gambar 2.3 dapat dilihat kurva keseimbangan di pasar tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja ditunjukkan dengan kurva permintaan (D) yang kemiringannya (*slope*) negatif dan penawaran tenaga kerja ditunjukkan dengan kurva penawaran (S) yang memiliki kemiringan positif. Keseimbangan tenaga kerja di tunjukkan dengan titik E (*equilibrium*) di mana terdapat hubungan tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja. Titik ini juga menunjukkan perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran tenaga kerja serta menunjukkan keseimbangan pada pasar

tenaga kerja dengan melihat besarnya tingkat upah yang ditunjukkan sebesar W dan jumlah tenaga kerja adalah sebesar L . Keadaan keseimbangan juga menunjukkan bahwa tenaga kerja yang diminta seimbang dengan tenaga kerja yang ditawarkan.

2.1.2 Teori Pertumbuhan Klasik

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu : jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung kepada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi klasik terutama menitikberatkan perhatiannya kepada pengaruh pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2008).

Menurut ahli-ahli klasik hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ini berarti pertumbuhan ekonomi tidak akan terus menerus berlangsung. Pada permulaannya, apabila penduduk sedikit dan kekayaan alam relatif berlebihan, tingkat pengembalian modal dari investasi yang dibuat adalah tinggi, para pengusaha akan mendapatkan keuntungan yang besar. Hal ini akan menimbulkan investasi baru, dan pertumbuhan ekonomi terwujud. Keadaan seperti itu tidak akan terus-menerus berlangsung. Jika penduduk sudah terlalu banyak, pertambahannya akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas setiap penduduk telah menjadi negatif, ini mengakibatkan kemakmuran masyarakat menurun kembali. Ekonomi akan mencapai tingkat perkembangan yang sangat rendah, apabila keadaan ini dicapai, maka ekonomi dikatakan telah mencapai

keadaan yang tidak berimbang (*stationary state*). Pada keadaan ini pendapatan pekerja hanya mencapai tingkat cukup hidup (*subsistence*). Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik setiap masyarakat tidak akan mampu menghalangi terjadinya keadaan tidak berimbang tersebut.

Berdasarkan penjelasan ahli-ahli ekonomi klasik, dikemukakan suatu teori yang menjelaskan perkaitan di antara pendapatan per kapita dan jumlah penduduk. Teori tersebut dinamakan teori penduduk optimum. Dari uraian tersebut dapat dilihat apabila kekurangan penduduk, produksi marjinal adalah lebih tinggi daripada pendapatan per kapita. Akibatnya penambahan penduduk akan menaikkan pendapatan per kapita. Di sisi lain, apabila penduduk sudah terlalu banyak, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi, maka produksi marjinal akan mulai mengalami penurunan. Berdasarkan hal tersebut, pendapatan nasional dan pendapatan per kapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya.

2.1.3 Teori Pertumbuhan David Ricardo

Menurut Sadono Sukirno (2008), Pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh SDA (dalam arti tanah) yang terbatas jumlahnya, dan jumlah penduduk yang menghasilkan jumlah tenaga kerja yang menyesuaikan diri dengan tingkat upah, diatas atau dibawah tingkat upah alamiah (minimal). David Ricardo juga melihat adanya perubahan teknologi yang selalu terjadi. Hal tersebut dapat menimbulkan meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan memperlambat proses *diminishing return*. David

Ricardo juga menyatakan bahwa masyarakat ekonomi terbagi menjadi 3 golongan yaitu golongan kapitalis, golongan buruh dan golongan tuan tanah. Menurut Ricardo, golongan kapitalis adalah golongan yang memimpin produksi dan memegang peranan penting, karena mereka selalu mencari keuntungan lalu menginvestasikannya kembali dalam bentuk penambahan modal yang mengakibatkan bertambahnya pendapatan nasional. Seiring dengan itu bertambah pula lapangan pekerjaan, sehingga golongan buruh yang merupakan golongan terbesar sangat bergantung kepada golongan kapitalis. Adapun golongan tuan tanah, mereka hanya menerima uang sewa dari golongan kapitalis atas tanah yang mereka sewakan. Oleh karena itu berlaku hukum hasil lebih yang makin berkurang.

2.1.4 Model Pertumbuhan Solow

Model pertumbuhan Solow adalah penyempurnaan model pertumbuhan Harrod-Domar. Dalam model Solow, proporsi faktor produksi diasumsikan dapat berubah (jumlah kapital dan tenaga kerja atau rasio dari kedua faktor ini tidak harus konstan) dan tingkat upah tenaga kerja dan suku bunga juga bisa berubah. Jika jumlah tenaga kerja tumbuh melebihi jumlah stok kapital, upah akan turun relatif terhadap suku bunga. Atau sebaliknya, jika pertumbuhan kapital melebihi pertumbuhan tenaga kerja, suku bunga akan turun relatif terhadap upah. Fleksibilitas harga faktor produksi ini yang memungkinkan jalur pertumbuhan dalam model ini bisa menjadi stabil, berbeda dengan model H-D yang bisa mengalami ketidakstabilan yang berkepanjangan jika syarat-syarat untuk mencapai pertumbuhan yang diinginkan

tidak terpenuhi. Model ini menganalisis pertumbuhan ekonomi (Y) dengan menggunakan fungsi produksi Cobb-douglas dengan dua faktor produksi, yakni kapital (K) dan tenaga kerja (L), dapat tumbuh pada tingkat yang berbeda:

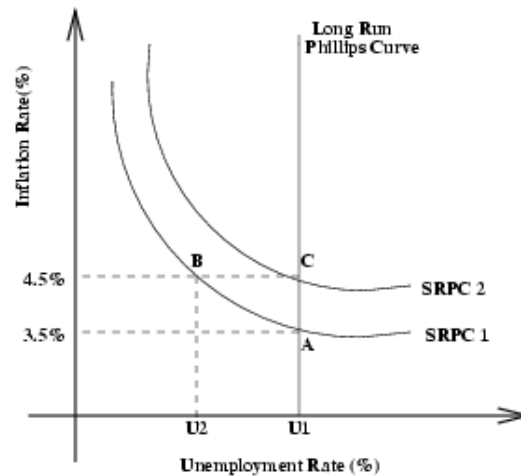
$$Y = K^{\alpha} (AL)^{\beta} \dots\dots\dots(2.1)$$

Dimana A = Konstanta yang nilainya berbeda-beda untuk perekonomian yang berbeda, dan α dan β adalah elastisitas output terhadap kapital dan tenaga kerja. Dalam fungsi produksi Cobb-Douglas, $\alpha + \beta = 1$ (atau $\beta = 1 - \alpha$), yang artinya bahwa peningkatan output sama persis dengan produktivitasnya fisik marginal dari kedua faktor produksi tersebut dikalikan dengan kenaikannya. Hal ini mengimplikasikan skala hasil yang konstan (Sadono Sukirno, 2008).

2.1.5 Teori A.W. Phillips

Dalam Amri Amir (2007), menjelaskan bahwa teori A.W. Phillips muncul karena pada saat tahun 1929, terjadi depresi ekonomi Amerika Serikat, hal ini berdampak pada kenaikan inflasi yang tinggi dan diikuti dengan pengangguran yang tinggi pula. berdasarkan pada fakta itulah A.W. Phillips mengamati hubungan antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran. Dari hasil pengamatannya, ternyata ada hubungan yang erat antara Inflasi dengan tingkat pengangguran, jika inflasi tinggi, pengangguran pun akan rendah. Hasil pengamatan Phillips ini dikenal dengan kurva Phillip.

Gambar 2.4
Kurva Phillips



Sumber : Amri Amir, 2007

Berdasarkan Gambar 2.4 A.W Phillips menggambarkan hubungan antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, berdasarkan teori permintaan, permintaan naik, harga akan naik pula. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja, maka dengan naiknya harga-harga (inflasi) pengangguran berkurang.

Menurut Ghofari (dikutip dari Dernburg dan Muchtar, 2010), inflasi dapat dikaitkan secara langsung dengan besarnya pengangguran yang terjadi. Hal ini dapat

diketahui pada kaitan antara tingkat inflasi (upah) dengan tingkat pengangguran yang ditunjukkan dengan kurva phillips. Pada awalnya, kurva Phillips memberikan gambaran kasar mengenai kausalitas proses inflasi. Rendahnya tingkat pengangguran dianggap memiliki keterkaitan dengan ketatnya pasar tenaga kerja dan tingginya tingkat pendapatan dan permintaan dari konsumen. Kurva Phillips juga memberikan gagasan mengenai pilihan (*trade off*) antara pengangguran dan inflasi. Jika tingkat inflasi yang diinginkan adalah rendah, maka akan terjadi tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Sebaliknya, jika tingkat inflasi yang diinginkan tinggi, maka akan terjadi tingkat pengangguran yang relatif rendah.

2.1.6 Pengangguran

Pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif dalam empat minggu terakhir untuk mencari pekerjaan (Kaufman dan Hotchkiss, 1999). Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut (Sukirno, 2006). Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta.

Menurut Sadono Sukirno (2006), pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif

mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur. Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat. Para pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud untuk mencari keuntungan. Keuntungan tersebut hanya akan diperoleh apabila para pengusaha dapat menjual barang yang mereka produksikan. Semakin besar permintaan, semakin besar pula barang dan jasa yang akan mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat diantara tingkat pendapatan nasional yang dicapai (GDP) dengan penggunaan tenaga kerja yang dilakukan; semakin tinggi pendapatan nasional (GDP), semakin banyak penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian.

Berdasarkan penyebabnya pengangguran dapat dibagi empat kelompok (Sadono Sukirno, 2006) :

a. Pengangguran normal atau friksional

Apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak dua atau tiga persen dari jumlah tenaga kerja maka ekonomi itu sudah dipandang sebagai mencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran sebanyak dua atau tiga persen tersebut dinamakan pengangguran normal atau pengangguran friksional. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik. Dalam perekonomian yang berkembang pesat, pengangguran adalah rendah dan pekerjaan mudah diperoleh. Sebaliknya pengusaha susah memperoleh pekerja, Akibatnya pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi. Hal ini akan mendorong para pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya yang lama dan

mencari pekerjaan baru yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan keahliannya. Dalam proses mencari kerja baru ini untuk sementara para pekerja tersebut tergolong sebagai penganggur. Penganggur inilah yang digolongkan sebagai pengangguran normal.

b. Pengangguran siklikal

Perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh. Adakalanya permintaan agregat lebih tinggi, dan ini mendorong pengusaha menaikkan produksi. Lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang. Akan tetapi pada masa lainnya permintaan agregat menurun dengan banyaknya. Misalnya, di negara-negara produsen bahan mentah pertanian, penurunan ini mungkin disebabkan kemerosotan harga-harga komoditas. Kemunduran ini menimbulkan efek kepada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan, yang juga akan mengalami kemerosotan dalam permintaan terhadap produksinya. Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya, sehingga pengangguran akan bertambah. Pengangguran dengan wujud tersebut dinamakan pengangguran siklikal.

c. Pengangguran struktural

Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju, sebagiannya akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor berikut: wujudnya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi mengurangi permintaan ke atas barang tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, dan ekspor produksi

industri itu sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius dari negara-negara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun, dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. Pengangguran yang wujud digolongkan sebagai pengangguran struktural. Dinamakan demikian karena disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi.

d. Pengangguran teknologi

Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Racun lalang dan rumput, misalnya, telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah dan lahan pertanian lain. Begitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat lubang, memotong rumput, membersihkan kawasan, dan memungut hasil. Sedangkan di pabrik-pabrik, ada kalanya robot telah menggantikan kerja-kerja manusia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi.

Berdasarkan cirinya, Pengangguran dibagi ke dalam empat kelompok (Sadono Sukirno, 2008) :

a. Pengangguran terbuka

Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang

mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan separuh waktu, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan sesuatu industri.

b. Pengangguran tersembunyi

Pengangguran ini terutama wujud di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung pada banyak faktor, Faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan (apakah intensif buruh atau intensif modal) dan tingkat produksi yang dicapai. Di banyak negara berkembang seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Contoh-contohnya ialah pelayan restoran yang lebih banyak dari yang diperlukan dan keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar yang mengerjakan luas tanah yang sangat kecil.

c. Pengangguran bermusim

Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula para petani tidak dapat mengerjakan tanahnya. Di samping itu pada umumnya para petani tidak begitu aktif

di antara waktu sesudah menanam dan sesudah menuai. Apabila dalam masa tersebut para penyadap karet, nelayan dan petani tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran seperti ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim.

d. Setengah menganggur

Di negara-negara berkembang penghijrahan atau migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat. Sebagai akibatnya tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagiannya terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Di samping itu ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti yang dijelaskan ini digolongkan sebagai setengah menganggur (*underemployed*). Dan jenis penganggurannya dinamakan *underemployment*.

Pengangguran akan muncul dalam suatu perekonomian disebabkan oleh tiga hal (Kaufman dan Hotkiss, 1999) :

a. Proses mencari kerja

Pada proses ini menyediakan penjelasan teoritis yang penting bagi tingkat pengangguran. Munculnya angkatan kerja baru akan menimbulkan persaingan yang ketat pada proses mencari kerja. Dalam proses ini terdapat hambatan dalam mencari kerja yaitu disebabkan karena adanya para pekerja yang ingin pindah ke pekerjaan lain, tidak sempurnanya informasi yang diterima pencari kerja mengenai lapangan

kerja yang tersedia, serta informasi yang tidak sempurna pada besarnya tingkat upah yang layak mereka terima, dan sebagainya.

b. Kekakuan upah

Besarnya pengangguran yang terjadi dipengaruhi juga oleh tingkat upah yang tidak fleksibel dalam pasar tenaga kerja. Penurunan pada proses produksi dalam perekonomian akan mengakibatkan pergeseran atau penurunan pada permintaan tenaga kerja. Akibatnya, akan terjadi penurunan besarnya upah yang ditetapkan. Dengan adanya kekakuan upah, dalam jangka pendek, tingkat upah akan mengalami kenaikan pada tingkat upah semula. Hal ini akan menimbulkan kelebihan penawaran (*excess supply*) pada tenaga kerja sebagai inflasi dari adanya tingkat pengangguran akibat kekakuan upah yang terjadi.

c. Efisiensi upah

Besarnya pengangguran juga dipengaruhi oleh efisiensi pada teori pengupahan. Efisiensi yang terjadi pada fungsi tingkat upah tersebut terjadi karena semakin tinggi perusahaan membayar upah maka akan semakin keras usaha para pekerja untuk bekerja (walaupun akan muncul juga kondisi dimana terjadi *diminishing rate*). Hal ini justru akan memberikan konsekuensi yang buruk jika perusahaan memilih membayar lebih pada tenaga kerja yang memiliki efisiensi lebih tinggi maka akan terjadi pengangguran terpaksa akibat dari persaingan yang ketat dalam mendapatkan pekerjaan yang diinginkan.

2.1.7 Teori Pertumbuhan Penduduk

Didalam pembangunan ekonomi suatu negara, ekonomi sumber daya manusia mempunyai peranan penting. Menurut Ghofari (dikutip dari Soeroto, 2010) ada dua pengertian yang terkandung didalam sumber daya manusia, yaitu : Pertama, mengandung pengertian kerja atau jasa yang dapat diberikan didalam proses produksi. Kedua, menyangkut manusia yang mampu bekerja, mampu dalam arti dapat melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis. Dengan kata lain merupakan kelompok penduduk dalam usia kerja, yang dikenal dengan tenaga kerja.

Permintaan dan penawaran tenaga kerja merupakan jumlah usaha atau jasa kerja yang tersedia dalam masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa. Dalam definisi mengandung pengertian jumlah penduduk yang sedang dan siap untuk bekerja dan pengertian kualitas usaha kerja yang diberikan. Jumlah dan kualitas tenaga kerja tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor seperti jumlah penduduk, struktur umur, tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat penghasilan, pendidikan, produktifitas, dan sebagainya.

Masing-masing faktor tersebut dapat saling mempengaruhi serta secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi penyediaan tenaga kerja :

1. Laju pertumbuhan penduduk dapat mempengaruhi partisipasi angkatan kerja. Sebagai akibat dari tingkat kelahiran dan tingkat kematian yang rendah, maka penduduk makin menjadi tua. Dengan adanya perluasan program dan kenaikan tingkat pendidikan, mengakibatkan turunnya tingkat partisipasi dan selanjutnya akan mengurangi penyediaan tenaga kerja.

2. Dilihat dari struktur umur penduduk, penduduk usia muda mempunyai dua konsekwensi ekonomi. Pertama, beban tanggungan menjadi lebih besar. Kedua, jumlah pendatang baru yang memasuki pasar tenaga kerja akan menjadi lebih besar. Dengan demikian akan memperbesar *supply* tenaga kerja pada pasar tenaga kerja.
3. Kualitas pekerjaan yang dibutuhkan cenderung semakin meningkat akibat dari adanya perluasan fasilitas-fasilitas pendidikan. Sebabnya adalah karena orang-orang yang berpendidikan yang memasuki pasar tenaga kerja mengharapkan pekerjaan yang sama dengan para pekerja berpendidikan sebelumnya.

Disisi lain faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya permintaan tenaga kerja akan sangat dipengaruhi oleh laju pertumbuhan kesempatan kerja. Sedangkan laju pertumbuhan kesempatan kerja itu sendiri sangat tergantung pada laju pertumbuhan output dan perubahan rata-rata tenaga kerja.

2.1.8 Teori inflasi

Inflasi menurut Nopirin (dalam Ghofari, 2010) adalah proses kenaikan harga – harga umum barang- barang secara terus-menerus. Sedangkan, menurut Sadono Sukirno (2008) inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Sedangkan tingkat inflasi adalah persentasi kenaikan harga-harga barang dalam periode waktu tertentu.

Berdasarkan jenis penyebabnya inflasi di bagi tiga (Sukirno,2006) :

a. Inflasi tarikan permintaan

Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa.pengeluaran ini akan menimbulkan inflasi.

b. Inflasi desakan biaya

Inflasi ini juga berlaku dalam masa perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran adalah sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerjaan baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat, yang akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga-harga berbagai barang.

c. Inflasi diimpor

inflasi dapat juga bersumber dari kenaikan harga - harga barang yang diimpor. Inflasi ini akan wujud apabila barang – barang diimpor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan – perusahaan.

2.1.9 Pendapatan Nasional

Menurut Sadono Sukirno (2008) pendapatan nasional dimaksudkan untuk menyatakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara. Dengan demikian dalam konsep tersebut istilah pendapatan nasional adalah mewakili arti *Gross Domestic Product dan Gross National Product*. Menurut Sadono Sukirno, Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu. Dalam sistem penghitungan pendapatan nasional itu dinamakan Produk Nasional Netto pada harga faktor atau secara ringkas disebut Pendapatan Nasional

Produk Domestik Bruto adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di dalam negara tersebut dalam satu tahun tertentu (Sukirno, 2006). Sedangkan Produk Nasional Bruto nilai barang dan jasa yang dihitung dalam pendapatan nasional hanyalah barang dan jasa yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara dari negara yang pendapatannya dihitung.

Menurut Biro Pusat Statistik (BPS, 2007) penetapan *Gross Domestic Product* (GDP) dapat dilakukan dari tiga sudut pandang, yaitu:

1. Sudut pandang produksi, GDP merupakan jumlah nilai produksi netto dari barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dibagi menjadi sembilan kelompok usaha, yaitu: sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalan; sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air, sektor;

sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor angkutan dan komunikasi; sektor lembaga keuangan, sewa bangunan dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa.

2. Sudut pandang pendapatan, GDP merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh berbagai faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam suatu wilayah dan dalam jangka waktu tertentu.
3. Sudut pandang pengeluaran, GDP merupakan jumlah pengeluaran rumah tangga lembaga swasta yang tidak mencari untung dan pengeluaran pemerintah sebagai konsumen pengeluaran untuk pembentukan modal tetap serta perubahan stok dan ekspor netto di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

Output atau pendapatan nasional merupakan ukuran paling komprehensif dari tingkat aktivitas ekonomi suatu Negara (Lipsey, 1996). Salah satu ukuran yang lazim digunakan untuk output adalah *Gross Domestic Product* (GDP). GDP dapat dilihat sebagai perekonomian total dari setiap orang di dalam perekonomian atau sebagai pengeluaran total pada output barang dan jasa perekonomian (Mankiw, 2000). Output ini dinyatakan dalam satuan mata uang (rupiah) sebagai jumlah dari total keluaran barang dan jasa dikalikan dengan harga per unitnya. Jumlah total tersebut sering disebut sebagai output nominal, yang dapat berubah karena perubahan baik jumlah fisik maupun perubahan harga terhadap periode dasarnya. Untuk mengetahui seberapa jauh perubahan tersebut karena perubahan fisik saja, maka nilai output diukur tidak pada harga sekarang tetapi pada harga yang berlaku pada periode dasar

yang dipilih. Jumlah total ini disebut sebagai output riil. Perubahan persentase dari output riil disebut sebagai pertumbuhan ekonomi.

2.1.10 Teori upah

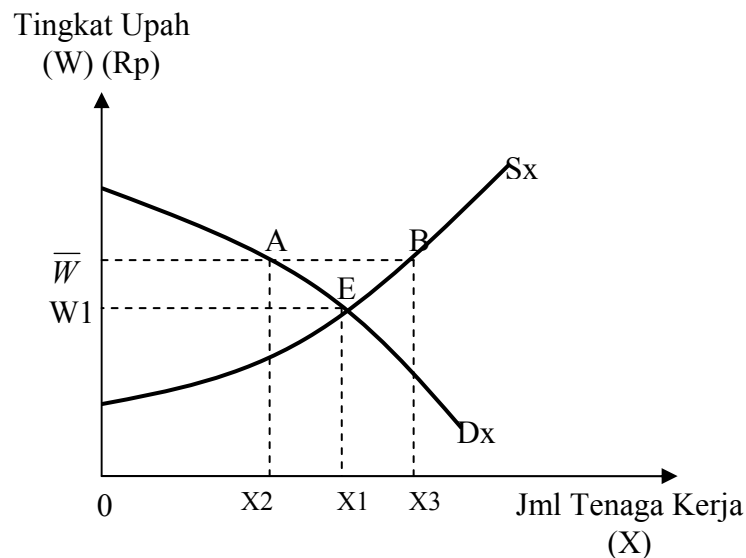
Upah adalah pendapatan yang diterima tenaga kerja dalam bentuk uang, yang mencakup bukan hanya komponen upah/gaji, tetapi juga lembur dan tunjangan-tunjangan yang diterima secara rutin/reguler (tunjangan transport, uang makan dan tunjangan lainnya sejauh diterima dalam bentuk uang), tidak termasuk Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan bersifat tahunan, kwartalan, tunjangan-tunjangan lain yang bersifat tidak rutin dan tunjangan dalam bentuk natural (BPS, 2008).

Menurut Gilarso (2003) balas karya untuk faktor produksi tenaga kerja manusia disebut upah (dalam arti luas, termasuk gaji, honorarium, uang lembur, tunjangan, dsb). Masih menurut Gilarso upah biasanya dibedakan menjadi dua, yaitu: upah nominal (sejumlah uang yang diterima) dan upah riil (jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan upah uang itu). Upah dalam arti sempit khusus dipakai untuk tenaga kerja yang bekerja pada orang lain dalam hubungan kerja (sebagai karyawan/buruh). Di Indonesia banyak orang berusaha sendiri dan tidak memperhitungkan "upah" untuk dirinya sendiri. Tetapi dalam analisis ekonomi, besar kecilnya balas karya mereka sebagai tenaga kerja seharusnya ikut diperhitungkan.

Dalam pasar tenaga kerja sangat penting untuk menetapkan besarnya upah yang harus dibayar perusahaan pada para pekerjanya. Jika diasumsikan penetapan upah minimum yang dikenakan terjadi di pasar persaingan sempurna (Gambar 2.5),

maka tingkat upah yang berlaku sebelum ada peraturan upah minimum adalah W_1 dan jumlah orang yang dipekerjakan adalah OX_1 (terjadi keseimbangan pada titik E). Dengan dikenakannya peraturan upah minimum sebesar \bar{W} , maka tingkat upah tidak bisa turun dibawah \bar{W} dan ini mengakibatkan permintaan tenaga kerja akan turun menjadi OX_2 sedangkan jumlah tenaga kerja yang menawarkan diri adalah sebesar OX_3 . Hal ini berarti bahwa tingkat upah yang lebih tinggi tersebut harus dibayar dengan ongkos sosial berupa X_2X_1 orang baru yang mencari kerja [jadi jumlah pengangguran total adalah X_2X_3 orang = $(X_2X_1 + X_1X_3)$ orang] (Boediono, 1991).

GAMBAR 2.5
KURVA PENETAPAN UPAH DI PASAR TENAGA KERJA



Sumber: Boediono, 2004

Tingkat upah disebut juga taraf balas karya rata-rata yang berlaku umum dalam masyarakat untuk segala macam pekerjaan. Tingkat upah ini dapat diperhitungkan per jam, hari, minggu, bulan atau tahun (Gilarso, 2003).

Sistem upah menurut Gilarso (2003) :

a. Upah menurut prestasi (upah potongan)

Upah menurut prestasi adalah besarnya balas karya langsung dikaitkan dengan prestasi kerja karena besarnya upah tergantung dari banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu tertentu. Cara ini hanya dapat diterapkan kalau hasil kerja bisa diukur secara kuantitatif (dengan memperhitungkan kecepatan mesin, kualitas bahan yang dipakai, dll.).

b. Upah waktu

Upah waktu merupakan besar upah yang ditentukan atas dasar lamanya waktu pekerja melakukan pekerjaan bagi majikan. Bisa dihitung per jam, per hari, per minggu atau per bulan. Sistem ini terutama dipakai untuk jenis pekerjaan yang hasilnya sukar dihitung per potong. Cara ini memungkinkan mutu pekerjaan yang baik karena karyawan tidak tergesa-gesa; administrasinya pun dapat sederhana. Di samping itu perlu pengawasan apakah si pekerja sungguh-sungguh bekerja selama jam kerja.

c. Upah borongan

Upah borongan adalah balas jasa yang dibayar untuk suatu pekerjaan yang diborongkan. Cara memperhitungkan upah ini kerap kali dipakai pada suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok kerja. Untuk seluruh pekerjaan

ditentukan suatu balas karya, yang kemudian dibagi-bagi antara para pelaksana. Misalnya, untuk pembangunan gedung, pembuatan sumur, dan lain-lain.

d. Upah premi

Upah premi merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah potongan. Upah dasar untuk prestasi "normal" berdasarkan waktu atau jumlah hasil. Apabila seorang pekerja mencapai prestasi yang lebih dari itu, pekerja tersebut diberi "premi". Premi dapat juga diberikan, misalnya untuk penghematan waktu, penghematan bahan, kualitas produk yang baik, dan sebagainya. Dalam perusahaan modern patokan untuk prestasi minimal ditentukan secara ilmiah berdasarkan *time and motion study*.

e. Upah bagi hasil

Bagi hasil merupakan cara yang biasa di bidang pertanian dan dalam usaha keluarga, tetapi juga dikenal di luar kalangan itu. Misalnya, pekerja atau pelaksana diberi bagian dari keuntungan bersih; direksi sebuah PT mendapat *tantieme*; bahkan kaum buruh dapat diberi saham dalam PT tempat mereka bekerja sehingga kaum buruh ikut menjadi pemilik perusahaan.

f. Peraturan gaji pegawai negeri

Gaji Pegawai Negeri Sipil (GPNS) berdasarkan dua prinsip : pendidikan dan masa kerja. Setiap orang yang diangkat sebagai pegawai negeri mendapat gaji pokok yang ditentukan oleh golongan dan masa kerja.

Secara empiris besarnya tingkat upah sangat dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu (Ananta, 2000) :

a. Kebutuhan fisik minimum

Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) merupakan kebutuhan pokok seseorang yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi fisik dan mentalnya agar dapat menjalankan fungsinya sebagai salah satu faktor produksi yang dilihat dari kualitas barang dan jasa yang dibutuhkan.

b. Indeks harga konsumen

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan petunjuk mengenai naik turunnya harga kebutuhan hidup, peningkatan terhadap harga kebutuhan hidup ini secara tidak langsung dapat mencerminkan tingkat inflasi.

c. Pertumbuhan ekonomi daerah

Pertumbuhan ekonomi daerah mencerminkan keadaan perekonomian dalam suatu daerah yang mempengaruhi pertumbuhan dan kondisi perusahaan yang beroperasi di daerah yang bersangkutan.

2.1.11 Hubungan Antara Variabel Dependen dan Variabel Independen

Adapun variabel – variabel yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran adalah variabel pertumbuhan penduduk, variabel tingkat inflasi, variabel tingkat GDP, dan variabel besaran upah.

2.1.11.1 Hubungan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran

Efek pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pengangguran dari pasar tenaga kerja, menyimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk mempunyai implikasi yang penting bagi kesempatan kerja. Menurut Oberai (dalam Ghofari, 2010) pertumbuhan

penduduk yang cepat tanpa disertai dengan proporsi investasi yang lebih besar, mengakibatkan kurangnya lapangan pekerjaan, meningkatnya pengangguran dan menghalangi transformasi struktural dalam angkatan kerja.

Permintaan dan penawaran tenaga kerja merupakan jumlah usaha atau jasa kerja yang tersedia dalam masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa. Dalam definisi mengandung pengertian jumlah penduduk yang sedang dan siap untuk bekerja dan pengertian kualitas usaha kerja yang diberikan. Jumlah dan kualitas tenaga kerja tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor seperti jumlah penduduk, struktur umur, tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat penghasilan, pendidikan, produktifitas, dan sebagainya.

2.1.11.2 Hubungan Tingkat Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran

Inflasi memiliki hubungan terhadap tingkat pengangguran. Apabila inflasi yang dihitung adalah tingkat inflasi yang terjadi pada harga-harga secara umum, maka tingginya tingkat inflasi yang terjadi akan berakibat pada peningkatan pada tingkat bunga (pinjaman). Oleh karena itu, dengan tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi investasi untuk mengembangkan sektor-sektor yang produktif (Sukirno, 2006). Hal ini akan berpengaruh pada jumlah pengangguran yang tinggi karena rendahnya kesempatan kerja sebagai akibat dari rendahnya investasi. Karena adanya kecenderungan bahwa tingkat inflasi dan pengangguran kedudukannya naik (tidak ada *trade off*) maka menunjukkan bahwa adanya perbedaan dengan kurva philips

dimana terjadi *trade off* antara inflasi yang rendah atau pengangguran yang rendah (Nopirin, 2000).

2.1.11.3 Hubungan Tingkat GDP Terhadap Tingkat Pengangguran

Setiap adanya peningkatan persentase atau tingkat pengangguran dalam suatu negara, maka hal tersebut akan setara dengan terjadinya penurunan besar GDP sebesar 2 persen. Semakin besar permintaan, semakin besar pula barang dan jasa yang akan mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat diantara tingkat pendapatan nasional yang dicapai (GDP) dengan penggunaan tenaga kerja yang dilakukan, semakin tinggi pendapatan nasional (GDP), semakin banyak penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian.

2.1.11.4 Hubungan Upah Terhadap Tingkat Pengangguran

Hubungan upah yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran dijelaskan oleh Kaufman dan Hotckiss (1999). Tenaga kerja yang menetapkan tingkat upah minimumnya pada tingkat upah tertentu, jika seluruh upah yang ditawarkan besarnya dibawah tingkat upah tersebut, seseorang akan menolak mendapatkan upah tersebut dan akibatnya menyebabkan pengangguran. Jika upah yang ditetapkan pada suatu daerah terlalu rendah, maka akan berakibat pada tingginya jumlah pengangguran yang terjadi pada daerah tersebut. Namun dari sisi pengusaha, jika upah meningkat dan biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, maka akan mengurangi efisiensi

pengeluaran, sehingga pengusaha akan mengambil kebijakan pengurangan tenaga kerja guna mengurangi biaya produksi. Hal ini akan berakibat peningkatan pengangguran.

Menurut Samuelson (1997), peningkatan upah menimbulkan dua efek yang bertentangan atas penawaran tenaga kerja. Pertama, efek substitusi yang mendorong tiap pekerja untuk bekerja lebih lama, karena upah yang diterimanya dari tiap jam kerja lebih tinggi. Kedua, Efek pendapatan mempengaruhi segi sebaliknya, yaitu tingginya upah menyebabkan pekerja ingin menikmati lebih banyak rekreasi bersamaan dengan lebih banyaknya komoditi yang dibeli. Pada suatu tingkat upah tertentu, kurva penawaran tenaga kerja akan berlekuk kebelakang (*backward bending curve*). Kurva penawaran tenaga kerja dari orang-orang yang sangat berbakat serta unik, mempunyai bentuk yang tidak elastis. Upah mereka sebagian besar merupakan sewa ekonomi murni.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian oleh John Dinarno dan Mark P. Moore (1999), yang berjudul "*The Phillips Curve is Back? Using Panel Data to Analyze The Relationship Between Unemployment and Inflation in an Open Economy*". Pada penelitian yang dilakukan ini berupaya untuk mencari hubungan antara tingkat inflasi (melalui GDP Deflator)

dengan tingkat pengangguran yang terjadi di sembilan negara OECD (*Open Economic Countries Development*) antara lain : Belgia, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Belanda, Inggris dan Amerika Serikat. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan panel data dengan model penghitungan OLS (*Ordinary Least Square*). Data yang digunakan antara lain adalah data *cross section* pada tingkat inflasi (menggunakan IHK, kuartal), tingkat pengangguran dan tingkat suku bunga (untuk mengukur harapan inflasi di masa datang). Dari penelitian ini dihasilkan adanya hubungan yang positif antara tingkat inflasi melalui GDP Deflator dengan tingkat pengangguran yang terjadi. Semakin tinggi tingkat inflasi yang terjadi di suatu negara maka akan berdampak pada tingginya tingkat pengangguran yang ditimbulkannya.

2. Heru Susanto (2001), dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Di Indonesia Periode 1981-1999”, yang menggunakan regresi linear berganda dengan metode OLS dengan model:

$$\text{Ln}Y = \alpha + \beta_0 \text{Ln}Wa + \beta_1 \text{Ln}Prod + \beta_2 \text{Ln}Inf + \beta_3 \text{Ln}Lf + \beta_4 \text{Ln}Pdb + \varepsilon$$

Dimana :

- Y = tingkat pengangguran
- α = konstanta
- Wa = tingkat upah
- Prod = produktifitas tenaga kerja
- Inf = inflasi

Lf = jumlah angkatan kerja
Pdb = produk domestik bruto
 ε = error term

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut pertama, pergerakan atau perubahan pada tingkat pengangguran di Indonesia periode tahun 1981-1999 ternyata dipengaruhi dan dapat dijelaskan oleh variabel-variabel : inflasi, produktifitas tenaga kerja, tingkat upah, angkatan kerja, dan produk domestik bruto (PDB).

Kedua, ada dua variabel yaitu tingkat upah dan produk domestik bruto (PDB) mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia secara signifikan dengan arah yang negatif, artinya kenaikan tingkat upah atau produk domestik bruto akan menyebabkan turunnya tingkat pengangguran di Indonesia. Kenaikan 1 % pada tingkat upah akan menyebabkan turunnya tingkat pengangguran sebesar 0,136 %, hal tersebut dikarenakan bila terjadi kenaikan tingkat upah, maka para pekerja akan mengira upah riil mereka meningkat sehingga bersedia untuk bekerja lebih dan akan meningkatkan output yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat pengangguran. Kenaikan produk domestik bruto (PDB) 1 % akan menyebabkan turunnya tingkat pengangguran sebesar 22,173 %, hal ini karena output yang dihasilkan lebih banyak

berarti lebih banyak pekerja yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa.

Ketiga tingkat pengangguran di Indonesia juga dipengaruhi oleh variabel inflasi, produktifitas tenaga kerja, dan angkatan kerja. Dimana ketiga variabel tersebut mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia secara signifikan dengan arah yang positif, artinya kenaikan inflasi, produktifitas tenaga kerja, dan angkatan kerja akan menyebabkan naiknya tingkat pengangguran di Indonesia. Kenaikan inflasi sebesar 1 % akan menaikkan tingkat pengangguran sebesar 0,041 % karena yang terjadi di Indonesia adalah *cost push-inflation* sehingga kenaikan inflasi justru menaikkan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga jumlah pekerja di perusahaan justru dikurangi menyebabkan naiknya tingkat pengangguran. Kenaikan 1 % produktifitas tenaga kerja menyebabkan kenaikan tingkat pengangguran sebesar 22,121 % hal ini disebabkan dengan meningkatnya produktifitas tenaga kerja berarti tenaga kerja yang dibutuhkan akan berkurang untuk suatu tingkat output yang sama. Kenaikan 1 % angkatan kerja menyebabkan kenaikan tingkat pengangguran sebesar 23,146 %, karena pertumbuhan angkatan kerja lebih besar dari pertumbuhan kesempatan kerja sehingga kenaikan angkatan kerja akan menaikkan tingkat pengangguran.

Keempat, faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia adalah variabel angkatan kerja, dimana hal ini dapat dilihat dari nilai koefisiennya yang paling besar dibandingkan variabel-variabel lainnya yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia dalam penelitian ini. Juga dapat disebabkan karena terus bertambahnya jumlah angkatan kerja tiap tahunnya tanpa disertai pertumbuhan output yang cukup dan kurangnya penciptaan lapangan kerja baru.

3. Penelitian oleh Amri Amir (2007) yang berjudul "Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran di Indonesia". Pada penelitian ini penulis ingin meneliti seberapa besar pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Indonesia. Penelitian ini juga mengacu pada analisis kurva phillips serta menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara tingkat pengangguran dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat 1 persen, maka pengangguran akan menurun sekitar 0,46 persen. Dengan demikian, penggambaran kurva phillips yang menghubungkan inflasi dengan tingkat pengangguran untuk kasus Indonesia tidak tepat untuk digunakan sebagai kebijakan untuk menekan tingkat pengangguran. Hasil analisis statistik pengujian pengaruh inflasi terhadap pengangguran selama periode 1980 – 2005

ditemukan bahwa tidak ada pengaruh yang nyata antara inflasi dengan tingkat pengangguran.

4. Fitra Kincaka Rizka (2007), dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Tingkat Pengangguran Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Indonesia”, yang menggunakan regresi linear berganda dengan metode OLS dengan model:

$$TP = \beta_0 + \beta_1 GDP + \beta_2 INF + \beta_3 UP + \beta_4 BTP + \mu$$

Keterangan :

TP	= Tingkat Pengangguran (%)
GDP	= Gross Domestic Product (%)
INF	= Inflasi (%)
BTP	= Beban Tanggungan Penduduk
UP	= Upah
β_0	= Konstan
β_1	= Koefisien
μ	= Faktor Pengganggu

Hasil dari penelitian tersebut adalah menyatakan bahwa pertama, upah merupakan salah satu permasalahan yang memberikan pengaruh terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Tingginya tingkat upah yang diterima ternyata sejalan dengan peningkatan yang terjadi terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Dalam penelitian

ini didapat hasil bahwa tingkat upah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia.

Kedua, Beban Tanggungan Penduduk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya tingkat pengangguran yang terjadi di Indonesia. Semakin rendah Beban Tanggungan Penduduk yang terjadi ternyata tidak diikuti dengan menurunnya tingkat pengangguran di Indonesia. Sesuai pernyataan tersebut, dalam penelitian ini memberikan hasil bahwa di Indonesia tingkat Beban Tanggungan Penduduk memiliki pengaruh yang negatif dan cukup signifikan terhadap tingkat pengangguran yang terjadi.

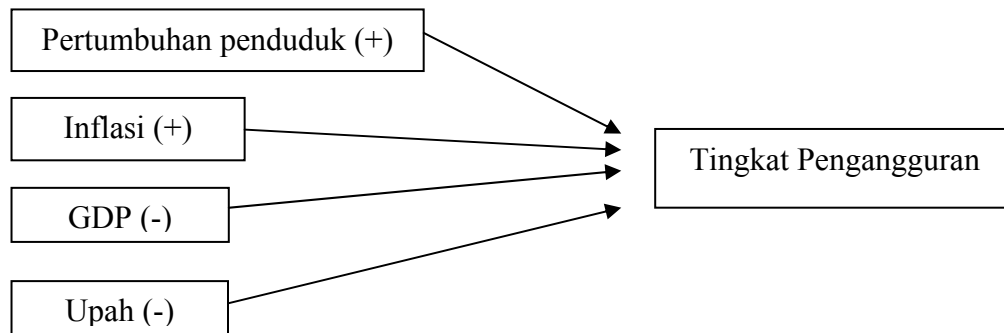
Ketiga, tingkat inflasi dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat pengangguran yang terjadi. Di Indonesia, tingkat inflasi yang rendah berdampak pada tingginya tingkat pengangguran yang terjadi. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa tingkat inflasi kurang berpengaruh signifikan dalam mempengaruhi tingkat pengangguran yang terjadi di Indonesia.

Keempat, tingkat pertumbuhan GDP dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pengangguran di Indonesia. Rendahnya tingkat pertumbuhan GDP yang terjadi ternyata diiringi dengan tingginya tingkat pengangguran yang terjadi. Hal ini memberikan arti bahwa tingkat pertumbuhan GDP yang ada di Indonesia kurang memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran yang ada.

Kelima, tingkat pengangguran di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor. Beberapa diantaranya Upah, Beban Tanggungan Penduduk, Inflasi dan GDP terhadap Tingkat Pengangguran yang terjadi di Indonesia. Dari hasil penelitian yang dilakukan didapat bahwa keempat variabel tersebut merupakan penjelas terhadap tingkat pengangguran. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya nilai R^2 sebesar 0,958 yang berarti bahwa tingkat pengangguran di Indonesia dijelaskan oleh keempat variabel tersebut sebesar 95,8 persen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya. Selain itu, melalui nilai statistik F sebesar 0,000 (dibawah tingkat signifikansi 0,05) serta memiliki nilai F statistik $>$ nilai F tabel, yaitu $136,049 > 2,78$. Sehingga keempat variabel tersebut juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia.

2.3 Kerangka Penelitian

Untuk memudahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan serta untuk memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, berikut ini digambarkan suatu kerangka pemikiran yang skematis sebagai berikut :

Gambar 2.5

Sumber: Penelitian Terdahulu

Kenaikan jumlah penduduk yang terjadi di Indonesia mengakibatkan lonjakan angkatan kerja. Akan tetapi dengan sempitnya lahan pekerjaan di Indonesia ini, para angkatan kerja tersebut tidak akan terserap sepenuhnya, bahkan tidak terserap dalam jumlah banyak banyak. Akibatnya pengangguran pun meningkat. Tingkat inflasi memiliki hubungan terhadap besarnya jumlah pengangguran yang terjadi. Peningkatan pada inflasi akan menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran. Hal ini terjadi sebagai akibat dari peningkatan pada tingkat inflasi akan menurunkan tingkat dan investasi, Akibatnya jumlah pengangguran meningkat seiring kesempatan kerja yang rendah. Pertumbuhan ekonomi melalui penambahan GDP akan berpengaruh terhadap jumlah pengangguran, karena pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi oleh peningkatan kapasitas produksi, sehingga pengangguran tetap meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Besaran upah akan mempengaruhi jumlah pengangguran melalui permintaan dan penawaran tenaga kerja. Hal ini terjadi karena upah minimum yang diterima adalah upah terendah yang akan diterima oleh pencari kerja. Hal tersebut akan mempengaruhi seseorang untuk menganggur dalam

waktu tertentu untuk mencari pekerjaan terbaik dan tentunya upah yang tinggi. Besaran yang digunakan untuk mengukur jumlah pengangguran yang dilakukan adalah dengan besaran upah rata-rata *per* propinsi dalam satu tahun.

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah penjelasan sementara yang harus diuji kebenarannya mengenai masalah yang diteliti, dimana hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variable atau lebih (Supranto, 2001).

Hipotesis yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga terdapat pengaruh positif antara pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pengangguran, bahwa semakin tinggi pertumbuhan penduduk di Indonesia maka tingkat pengangguran akan semakin tinggi.
2. Diduga terdapat pengaruh positif antara tingkat inflasi terhadap tingkat pengangguran, bahwa semakin tinggi tingkat inflasi di Indonesia maka tingkat pengangguran akan semakin tinggi.
3. Diduga terdapat pengaruh negatif antara besarnya jumlah GDP (*Gross Domestic Product*) terhadap tingkat pengangguran, bahwa semakin tinggi jumlah GDP (*Gross Domestic Product*) di Indonesia maka tingkat pengangguran akan semakin rendah.

4. Diduga terdapat pengaruh negatif antara besaran upah terhadap tingkat pengangguran, bahwa semakin tinggi besaran upah di Indonesia maka tingkat pengangguran akan semakin rendah.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara kerja atau prosedur mengenai bagaimana kegiatan yang akan dilakukan untuk mengumpulkan dan memahami objek-objek yang menjadi sasaran dari penelitian yang dilakukan (Nazir, 2003).

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek penelitian, sedangkan Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan memberikan arti (Nazir, 2003). Jadi variabel penelitian ini meliputi faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis variabel, yaitu variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas).

a. Variabel dependen

Di dalam penelitian ini digunakan tingkat pengangguran sebagai variabel tidak bebas. Variabel tingkat pengangguran yang digunakan adalah tingkat pengangguran di Indonesia dengan satuan persen (%). Variabel tingkat pengangguran dihitung melalui persentase antara jumlah orang yang menganggur dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. Perhitungan tingkat pengangguran ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{jumlah pencari kerja}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$$

b. Variabel independen

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai variabel independen adalah tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat inflasi, tingkat GDP, dan besaran upah.

a. Pertumbuhan Penduduk

Tingkat pertumbuhan penduduk diukur dengan tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun yang dinyatakan dalam satuan persen (%).

b. Inflasi

Tingkat inflasi yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan besarnya perubahan harga-harga secara umum pada periode waktu tertentu. Perhitungan ini menggunakan besarnya laju inflasi gabungan di Indonesia dalam periode 1 tahun (*year on year*) dengan satuan persen

c. GDP

GDP merupakan hasil penjumlahan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh unit-unit seluruh kegiatan ekonomi dalam batas wilayah suatu negara pada suatu periode tertentu (biasanya 1 tahun) (BPS, 2007). Dalam penelitian ini menggunakan besaran GDP dengan harga konstan di Indonesia dengan satuan rupiah (Rp). Besarnya GDP berdasarkan harga

konstan di Indonesia diukur berdasarkan tahun dasar 2000, perubahan tahun dasar dilakukan karena keadaan perekonomian tahun 1993 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perekonomian dewasa ini, baik yang menyangkut perkembangan harga, pola produksi dan konsumsi, serta jenis dan kualitas barang maupun jasa yang dihasilkan. Pemilihan tahun 2000 sebagai tahun dasar baru didasarkan pada indeks terbaru yang dikeluarkan pemerintah melalui Badan Pusat Statistik Indonesia yang berdasarkan pengamatan bahwa perekonomian pada tahun tersebut stabil (Statistik Ekonomi-Keuangan BI, 2007). Penelitian ini menggunakan metode penghitungan yang digunakan oleh *International Monetary Fund* (IMF).

d. Upah

Tingkat upah sangat mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia, karena para pencari kerja rela untuk menganggur untuk waktu tertentu dengan asumsi akan mendapatkan upah yang lebih tinggi. Penentuan upah ini menggunakan upah rata-rata propinsi di Indonesia dengan satuan rupiah.

3.2 Jenis dan Sumber data

Dalam penelitian ini digunakan sumber data sekunder yang dikumpulkan dan diperoleh secara runtut waktu (*time series*) dari tahun 1990-2010. Data yang diperlukan untuk penelitian ini adalah:

- a. Data mengenai besarnya Tingkat pengangguran terbuka yang terjadi di Indonesia selama periode tahun 1990-2010 yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) Indonesia.
- b. Data mengenai besarnya tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia pada tahun 1990-2010 yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) Indonesia.
- c. Data mengenai besarnya tingkat inflasi *year on year* di Indonesia pada tahun 1990-2010 yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) Indonesia.
- d. Data mengenai besarnya besaran *Gross Domestic Product* (GDP) yang diterima Indonesia berdasarkan harga konstan 2000 yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) Indonesia.
- e. Data mengenai besarnya besaran upah rata-rata propinsi yang ada di Indonesia pada periode 1990-2010 yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) Indonesia.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini juga diperoleh dengan cara studi pustaka yakni mengumpulkan dari buku-buku, jurnal-jurnal, *browsing* internet, serta koran-koran sebagai pendukung.

3.4 Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan meliputi analisis regresi berganda dan pendeteksian penyimpangan asumsi klasik yang meliputi deteksi multikolinearitas, deteksi autokorelasi, deteksi heterokedastisitas dan deteksi normalitas, selanjutnya pengujian ketepatan hipotesis yang meliputi regresi parsial dan regresi berganda yang menggunakan *evIEWS6*.

3.4.1 Analisis Regresi Berganda

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh suatu variabel terhadap perubahan variabel lainnya yang ada hubungannya untuk menguji model tingkat pengangguran di Indonesia yang dapat dinotasikan sebagai berikut :

Pengangguran = f (pertumbuhan penduduk, inflasi, GDP, Upah).

Kemudian dari fungsi tersebut dapat ditransformasikan ke dalam persamaan sebagai berikut :

$$TP = \beta_0 + \beta_1 PP + \beta_2 INF + \beta_3 GDP + \beta_4 UP + \mu$$

Variabel-variabel PP, INF, GDP, UP adalah variabel bebas (variabel independen). Sedangkan variabel tidak bebas (variabel dependen) yang digunakan adalah TP. Dimana :

TP = Tingkat Pengangguran

PP	= Pertumbuhan Penduduk
INF	= Tingkat Inflasi
GDP	= Gross Domestic Product
UP	= Besaran Upah
β_0	= Konstanta
$\beta_1 \dots \beta_4$	= Koefisien Variabel Bebas
μ	= Faktor Pengganggu

3.4.2 Pendeteksian Penyimpangan Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis data maka data diuji sesuai asumsi klasik, jika terjadi penyimpangan akan asumsi klasik digunakan pengujian statistik non parametrik. Sebaliknya asumsi klasik terpenuhi apabila digunakan statistik parametrik untuk mendapatkan model regresi yang baik, model regresi tersebut harus terbebas dari multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas serta data yang dihasilkan harus terdistribusi normal. Cara yang digunakan untuk menguji penyimpangan asumsi klasik adalah sebagai berikut :

3.4.2.1 Deteksi Normalitas

Deteksi Normalitas bertujuan untuk mendeteksi apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi

normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka deteksi statistik menjadi tidak berlaku (Ghozali, 2005).

Ada beberapa metode untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi residual antara lain Jarque-Bera (J-B) *Test* dan metode grafik. Dalam penelitian ini akan menggunakan metode J-B *Test*, apabila J-B hitung < nilai χ^2 (Chi-Square) tabel, maka nilai residual terdistribusi normal.

3.4.2.2 Deteksi Autokorelasi

Menurut Imam Ghozali (2005), Deteksi autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya), di mana jika terjadi korelasi dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*).

Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan uji *Breusch-Godfrey* (BG Test). Pengujian ini dilakukan dengan meregresi variabel pengganggu u_t dengan menggunakan model *autoregressive* dengan orde p sebagai berikut :

$$U_t = \rho_1 U_{t-1} + \rho_2 U_{t-2} + \dots + \rho_p U_{t-p} + \epsilon_t \dots\dots\dots(3.8)$$

Dengan H_0 adalah $\rho_1 = \rho_2 \dots \rho_p = 0$, di mana koefisien *autoregressive* secara keseluruhan sama dengan nol, menunjukkan tidak terdapat autokorelasi pada setiap orde. Secara manual, apabila χ^2 tabel lebih kecil dibandingkan dengan $\text{Obs} \cdot R^2$, maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model dapat ditolak.

3.4.2.3 Deteksi Multikolinieritas

Deteksi Multikolinieritas bertujuan untuk mendeteksi apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Apabila nilai R^2 yang dihasilkan dalam suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen, maka hal ini merupakan salah satu indikasi terjadinya multikolinieritas (Ghozali, 2005)

Multikolinieritas dalam penelitian ini dideteksi dengan menggunakan *auxiliary regressions* untuk mendeteksi adanya multikolinieritas. Kriterianya adalah jika R^2 regresi persamaan utama lebih besar dari R^2 *auxiliary regressions* maka di dalam model tidak terdapat multikolinieritas.

3.4.2.4 Deteksi Heteroskedastisitas

Deteksi heteroskedastisitas bertujuan untuk mendeteksi apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan

yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Gejala heteroskedastisitas lebih sering terjadi pada data *cross section* (Ghozali, 2005).

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat digunakan Deteksi White. Secara manual, deteksi ini dilakukan dengan meregresi residual kuadrat (u_t^2) dengan variabel bebas. Dapatkan nilai R^2 , untuk menghitung χ^2 , dimana $\chi^2 = n \cdot R^2$. Kriteria yang digunakan adalah apabila χ^2 tabel lebih kecil dibandingkan dengan nilai Obs*R-squared, maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam model dapat ditolak.

3.4.3 Pengujian Statistik

3.4.3.1 Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Suatu model mempunyai kebaikan dan kelemahan jika diterapkan dalam masalah yang berbeda. Untuk mengukur kebaikan suatu model (*goodness of fit*) digunakan koefisien determinasi (R^2). Koefisien determinasi (R^2) merupakan angka yang memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel tak bebas (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (X) (Gujarati, 2003). Koefisien determinasi dirumuskan sebagai berikut :

$$R^2 = \frac{\Sigma(\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{\Sigma(Y_i - \bar{Y})^2} \dots\dots\dots(3.5)$$

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2005)

3.4.3.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2005). Untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap dependen secara individu dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

(1) $H_0 : \alpha_1 = 0$, yaitu tidak ada pengaruh signifikan variabel pertumbuhan penduduk secara individu terhadap variabel tingkat pengangguran.

$H_1 : \alpha_1 > 0$, yaitu terdapat pengaruh positif signifikan variabel pertumbuhan penduduk secara individu terhadap variabel tingkat pengangguran.

(2) $H_0 : \alpha_2 = 0$, yaitu tidak ada pengaruh signifikan variabel inflasi terhadap variabel jumlah pengangguran.

$H_1 : \alpha_2 > 0$, yaitu terdapat pengaruh positif signifikan variabel inflasi terhadap variabel tingkat pengangguran di Indonesia.

(3) $H_0 : \alpha_3 = 0$, yaitu tidak ada pengaruh signifikan variabel pertumbuhan GDP terhadap variabel tingkat pengangguran di Indonesia.

$H_1 : \alpha_3 < 0$, yaitu terdapat pengaruh negatif signifikan variabel pertumbuhan GDP terhadap variabel tingkat pengangguran di Indonesia.

(4) $H_0 : \alpha_4 = 0$, yaitu tidak ada pengaruh signifikan variabel besaran upah terhadap variabel tingkat pengangguran di Indonesia.

$H_1 : \alpha_4 < 0$, yaitu terdapat pengaruh negatif signifikan variable besaran upah terhadap variabel tingkat pengangguran di Indonesia.

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan statistik t, di mana nilai t hitung dapat diperoleh dengan formula sebagai berikut :

$$t \text{ hitung} = \frac{b_j}{se(b_j)} \dots\dots\dots(3.6)$$

di mana :

b_j = koefisien regresi

$se(b_j)$ = *standar error* koefisien regresi

Uji t ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Apabila t hitung > t tabel, maka hipotesis alternatif diterima yang menyatakan bahwa variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya apabila t hitung < t tabel maka variabel independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen.

3.4.3.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Dalam mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama, menggunakan uji F dengan membuat hipotesis sebagai berikut :

$H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 0$, yaitu tidak ada pengaruh signifikansi variabel pertumbuhan penduduk, inflasi, GDP, upah terhadap tingkat pengangguran secara simultan.

$H_1 : \alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \alpha_3 \neq \alpha_4 \neq 0$,yaitu ada pengaruh signifikansi variabel pertumbuhan penduduk, inflasi, GDP, upah terhadap tingkat pengangguran secara simultan.

Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan antara nilai F hitung dengan F tabel, di mana nilai F hitung dapat dipenuhi dengan formula sebagai berikut :

$$F \text{ hitung} = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)} \dots\dots\dots(3.7)$$

Di mana :

R^2 : koefisien determinasi

k : jumlah variabel independen termasuk konstanta

n : jumlah sampel

Apabila nilai F hitung $>$ F tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya ada pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Sebaliknya apabila, F hitung $<$ F tabel maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya tidak ada pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005).